

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Artinya Indonesia terdiri dari beribu pulau yang tersebar di seluruh daerah. Salah satu pulau yang terkenal di Indonesia karena kaya akan budaya dan keanekaragamannya yaitu pulau Bali. Pulau Bali dikenal di dunia karena keindahan alam,kekayaan tradisi, budaya dan religinya. Berbicara pulau Bali maka selalu beriringan dengan upacara agama yang menjadi tradisi di Bali. Upacara keagamaan menjadi tradisi yang unik dan selalu dilestarikan. Berbagai macam upacara keagamaan yang menjadi keunikan di Bali yaitu upacara pawiwahan,metatah, mangguh, piodalan, ngaben, nyepi, galungan, kuningan dan lain-lain. Setiap desa memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri dalam melaksanakan upacara keagamaan. Umat Hindu di Bali akan bersama-sama bergotong royong untuk memeriahkan upacara agama yang sudah menjadi tradisi. Kebersamaan inilah yang dapat melestarikan tradisi dan budaya Bali hingga saat ini. Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki wilayah terbesar yaitu kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki luas 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23%) yang terbentang di wilayah utara Bali ([bulelengkab.go.id](http://bulelengkab.go.id)). Kabupaten Buleleng memiliki keanekaragaman budaya yang unik. Keragaman kesenian budaya di Buleleng yaitu Museum Buleleng, Tari Wali, Sapi Gerumbungan, dan lain-lain. Saat ini juga dikembangkan beberapa *sekaa* yang diwadahi oleh desa Pakraman yaitu *sekaa santhi*, *sekaa truna-truni*, *sekaa subak* dan *sekaa genjek*.

Berdasarkan potensi budaya dan keunikannya serta keterbatasan jarak dan waktu sehingga peneliti yang berdomisili di kota Singaraja melakukan penelitian di kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dan 148 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Kecamatan Gerokgak	14 desa	73 dusun
2	Kecamatan Seririt	21 desa	95 dusun
3	Kecamatan Busung Bui	15 desa	42 dusun
4	Kecamatan Banjar	17 desa	60 dusun
5	Kecamatan Sukasada	15 desa	65 dusun
6	Kecamatan Buleleng	29 desa	93 dusun
7	Kecamatan Sawan	14 desa	69 dusun
8	Kecamatan Kubutambahan	13 desa	46 dusun
9	Kecamatan Tejakula	10 desa	59 dusun

Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Kabupaten Buleleng memiliki seni dan budaya yang istimewa. Masyarakat Buleleng memiliki adat dan budaya yang masih kental seperti upacara keagamaan, kesenian, kesehatan dan hal lainnya. Kekuatan Bali terletak pada alam dan kebudayaannya. Salah satu kekuatan kebudayaan Bali dalam bidang agama adalah kesenian *sekaa santhi*. *Sekaa Santhi* memiliki kewajiban untuk mengiringi upacara keagamaan dengan kekidungan agar upacara berjalan lancar dan hikmat. Kidung merupakan seni suara dan karawitan di Bali yang awalnya berasal dari Jawa abad XVI sampai XIX (unud.ac.id). Kesenian kidung dikelompokkan dalam beberapa sekar madya yang meliputi jenis-jenis lagu pemujaan. Kidung dinyanyikan umumnya berkaitan dengan upacara baik upacara adat maupun agama. Kidung di Bali biasanya dimainkan bersama dengan instrumen. Lagu-lagu kidung ditulis dalam lontar tabuh-tabuh Gombang sehingga laras dan namanya banyak yang sama dengan penggambaran menggunakan laras pelog Sasih Pitu (Pelog 7 nada) yang terdiri dari nada pokok dan 2 nada pamaro/tengahan (unud.ac.id). Seiring berkembangnya waktu kekidungan mulai digemari oleh banyak masyarakat di Bali. Pemerintah juga sering mengadakan lomba-lomba kekidungan untuk terus mencari generasi-generasi penerusnya. Semakin

pentingnya upaya untuk melestarikan kesenian kidung maka dibentuklah *sekaa santhi* di setiap desa yang memiliki tugas mengiringi upacara-upacara agama maupun adat di desa. *Sekaa Santhi* yang diwadahi oleh desa Pakraman dan dibawah naungan Banjar ini akan terus berkembang dan akan selalu aktif di banjar.

*Sekaa* (Sekaha) adalah perkumpulan sekelompok orang yang dapat mempersatukan warga bali (Nitya Dewi, 2017). Beberapa seka yang biasanya dibentuk dalam suatu desa yaitu *sekaa* teruna-teruni, *sekaa* pesantian, *sekaa* ngelawang barong, *sekaa* subak, *sekaa* genjek dan lain-lain. Terdapat *sekaa* yang sangat aktif di kabupaten Buleleng yaitu *sekaa santhi* Eka Dharma Saba di Banjar Penarungan. *Sekaa Santhi* merupakan *sekaa* yang tekun membaca, memahami dan mengupas hasil sastra Kawi secara mendalam seperti kekawin. *Sekaa Santhi* akan selamanya digunakan untuk mengiringi upacara agama maupun adat di Bali. *Sekaa Santhi* Eka Dharma Saba menerima *luputan* dari banjar sebagai timbal balik sudah bersedia bergabung di organisasi tersebut. Kewajiban *sekaa santhi* yang mengiringi upacara keagamaan di Bali sangat diapresiasi oleh masyarakat. *Sekaa santhi* Eka Dharma Saba di banjar Penarungan, Kelurahan Penarukan setiap upacara keagamaan mendapatkan *batu-batu* serta *uleman* dari banjar. Upah yang diberikan akan dikelola oleh pengurus kemudian akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. *Sekaa santhi* Eka Dharma Saba biasanya mengadakan kegiatan besar setiap enam bulan sekali yaitu pada saat piodalan di pura dalem. Selain itu, *sekaa santhi* Eka Dharma Saba juga mengadakan kegiatan GENITRI (Gema Ekspresi Seni Truna Truni) setiap bulan Agustus. Dalam kegiatan tersebut *sekaa santhi* berkolaborasi dengan *sekaa* truna truni mengadakan lomba untuk mencari generasi-generasi penerus seni. Biasanya *sekaa santhi* akan fokus dalam lomba dharma gita sedangkan *sekaa* truna-truni fokus pada lomba tari bali, tari kreasi dan lomba karaoke. Keunikan inilah yang menjadi kekuatan tradisi dan budaya di Bali tetap lestari. Kekidungan merupakan faktor penting dalam semua upacara keagamaan seperti piodalan, pawiwahan, metatah, ngaben, dan lainnya. Kekidungan yang dinyanyikan oleh seka *Santhi* juga memiliki pakem-pakem tertentu. Beliau harus mengetahui dan mempelajari

setiap makna dari kekidungan tersebut agar tepat dikumandangkan saat upacara keagamaan tertentu.

Menurut Sekretaris *Sekaa Santhi* Eka Dharma Saba Ibu Ketut Sarimpen menyatakan bahwa contoh kekidungan saat upacara piodalan di Pura adalah kidung Pupuh Ginada. Hal inilah yang menjadi faktor banjar Penarungan mengapresiasi semua seka-seka yang terbentuk di banjaranya. Selain untuk mendorong semangat *ngayah* agar tetap lestari, masyarakat yang memiliki bakat seni dan budaya agar bersedia menunjukkan bakat yang mereka miliki. Berdasarkan hasil observasi, *sekaa santhi* Eka Dharma Saba di banjar Penarungan memiliki keunggulan dibandingkan dua *sekaa santhi* yang lainnya yaitu *sekaa santhi* di banjar Sidayu dan Satria. Menurut *Kelian* Banjar Sidayu bapak I Gede Rencana bahwa *sekaa santhi* di banjar Sidayu mendapatkan upah yang disebut *upon-upon* namun upah tersebut diberikan kepada setiap warga yang *luput* berkisar Rp 30.000-70.000/orang setiap piodalan di pura dalam. Kemudian, menurut *Kelian* Banjar Satria bapak Kadek Ardana bahwa di banjar Satria tidak mewanahi *sekaa santhi* dimana tidak ada struktur organisasi yang jelas mengenai *sekaa santhi*. Menurut Beliau setiap upacara agama dan adat, warga yang mempunyai kemampuan dharma gita biasanya secara langsung ikut *ngayah*. Berbeda halnya dengan *sekaa santhi* di banjar Penarungan mendapatkan upah *batu-batu uleman* berkisar Rp 400.000- Rp 600.000 yang diberikan terlebih dahulu kepada pengurus *sekaa santhi* untuk dikelola kemudian dari hasil *paruman* akan diberikan keputusan berapa persen masuk kas dan sisanya dibagikan kepada anggota. Jadi, *sekaa santhi* di banjar Penarungan memiliki struktur organisasi yang jelas. Berdasarkan keunikan dan keunggulan *sekaa santhi* di banjar Penarungan dengan *sekaa santhi* yang lain maka peneliti tertarik memilih *sekaa santhi* di banjar Penarungan sebagai objek dalam penelitian kali ini.

Menurut *Kelian* Banjar Penarungan I Nyoman Dana *Batu-batu* merupakan sebuah istilah berupa upah yang diberikan kepada *sekaa santhi* karena sudah bersedia *ngayah* mengiringi setiap upacara keagamaan di desa maupun di banjar. *Batu-batu* biasanya diberikan kepada seka *santhi* setiap

enam (6) bulan sekali saat upacara besar di Pura Dalem banjar Penarungan dan Pura Prajapati. Jumlah *batu-batu* yang diberi berkisar empat ratus ribu rupiah sampai enam ratus ribu rupiah tergantung hasil dari *paruman*. Semua anggota yang terlibat dalam kegiatan upacara agama di banjar Penarungan akan mendapatkan *batu-batu*. Istilahnya adalah *luputan*, masyarakat yang ikut *ngayah* dan bersedia menjadi anggota tetap untuk selalu siap membantu upacara agama disebut *luput*. Di Bali mungkin sudah tidak asing lagi dengan *luputan*, setiap desa di Buleleng khususnya pasti memiliki aturan atau pakem tertentu dalam mengelola *luputan*. *Luputan* di banjar Penarungan tidak hanya berdampak pada anggota *sekaa santhi* saja melainkan salah satu anak dari seka *santhi* juga mendapatkan keuntungannya. Mereka tidak diberi kewajiban untuk membayar *turunan* di banjar. *Turunan* merupakan dana yang harus dibayar oleh masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam upacara agama di banjar tersebut. Biasanya berdasarkan hasil *paruman*, masing-masing kepala keluarga akan dikenakan *turunan* dalam jumlah tertentu. Berbeda halnya dengan semua *sekaa santhi* yang berada di bawah naungan banjar tidak akan dikenai *turunan*. Hasil dari *turunan* tersebut akan dikelola oleh *kelian* di banjar. Setelah perincian dilakukan, apabila mendapatkan pendapatan yang lebih maka akan dijadikan *bakatan*. *Bakatan* akan dibagikan kepada semua *sekaa* atau masyarakat yang ikut *ngayah* dalam piodalan tersebut. Selanjutnya, *uleman* adalah undangan yang diberikan kepada seka-seka apabila terdapat upacara keagamaan di Banjar. *Sekaa santhi* yang mendapatkan *uleman* harus bersedia mengiringi upacara tersebut hingga selesai. Anggota *sekaa santhi* yang hadir dalam upacara tersebut akan mendapatkan upah sesuai kemampuan dari masyarakat yang mengadakan upacara agama. Upah yang diberikan berbeda-beda tergantung kemampuan dari keluarga penyelenggara upacara. Upah dari *uleman* akan diserahkan kepada bendahara *sekaa santhi*, kemudian akan dilakukan perincian berapa persen dimasukkan ke kas dan sisanya dibagikan kepada anggota.

Di Bali sangat erat hubungannya dengan *awig-awig*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali Pasal 1 ayat (29) *Awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh Desa Adat

dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu. Sebelum memutuskan awig-awig di suatu desa atau banjar diadakanlah sebuah *paruman*. *Paruman* adalah lembaga pengambil keputusan yang menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat. Sama halnya dengan *sekaa-sekaa* yang dibentuk di banjar sudah berdasarkan hasil *paruman*. *Batu-batu Uleman* di banjar Penarungan sudah berdasarkan hasil *paruman* dimana disetujui bahwa *sekaa-sekaa* yang memiliki *luputan* memperoleh *batu-batu uleman*. Awig-awig di Banjar Penarungan mengenai *batu-batu uleman* merupakan awig-awig tidak tersurat. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menyatakan bahwa Awig-awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Awig-awig *Batu-batu Uleman* di banjar Penarungan termasuk dalam awig-awig *Pawongan* Desa Adat. *Pawongan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar *Krama* di Wewidangan Desa Adat.

Organisasi keagamaan di pura merupakan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan, fokus mendukung isu-isu publik yang bersifat tidak komersil (Mahendra, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45, organisasi keagamaan adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari para anggota dan dari penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaannya yaitu dalam hal cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas organisasi. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Kusuma Dewi, 2020). *Sekaa santhi* Eka Dharma Saba merupakan organisasi nirlaba yang memiliki kewajiban untuk mengiringi upacara agama maupun adat dengan kekidungan. Dengan adanya pendapatan yang diberikan oleh *kelian* banjar kepada *sekaa santhi* untuk dikelola maka sudah seharusnya menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan.

Berdasarkan hasil pengamatan, *sekaa Santhi* Eka Dharma Saba tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Padahal jika diamati kegiatan yang dilakukan memiliki transaksi-transaksi dengan jumlah besar. Kegiatan besar yang diadakan *sekaa santhi* yaitu GENITRI (Gema Ekspresi Seni Truna Truni) yang diadakan setiap bulan Agustus. Kegiatan ini memerlukan dana yang besar sehingga pengelolaannya juga harus jelas. Selain itu, kegiatan setiap enam bulan sekali di pura dalem juga merupakan kegiatan yang cukup besar. *Sekaa santhi* Eka Dharma Saba juga harus mengeluarkan biaya seperti biaya konsumsi, pakaian, dan keperluan lainnya.

Dengan adanya hak yang diberikan oleh *kelian* banjar dan *krama* banjar Penarungan maka sudah seharusnya *sekaa santhi* Eka Dharma Saba membuat pencatatan yang jelas dan laporan pertanggungjawaban. Hal itu dikarenakan upah yang diberikan kepada *sekaa santhi* merupakan kas banjar. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban maka bisa sebagai *sinyaling* apakah organisasi *sekaa santhi* sudah melakukan pencatatan dengan baik atau tidak. Selain bentuk pertanggungjawaban untuk *kelian* banjar dan *krama* banjar juga sebagai pertanggungjawaban kepada anggota sehingga menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dalam akuntansi, teori sinyal digunakan untuk menekan akan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh organisasi kepada pihak luar (Putri & Kurniawan, 2017). Dalam hal ini, seharusnya *sekaa santhi* Eka Dharma Saba membuat laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan rancangan anggaran biaya agar prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan dapat terwujud.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam tindakan tertentu untuk bertanggung jawab dalam sekelompok orang atau dalam suatu organisasi. Pentingnya pelaksanaan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparan dan keadilan dapat memperoleh kepercayaan dari *stakeholder* (Paranoan & Totanan, 2018). Akuntabilitas sangat dibutuhkan bagi setiap organisasi baik organisasi profit maupun organisasi *non-profit* termasuk organisasi keagamaan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak

internal atau eksternal organisasi. Organisasi *sekaa santhi* Eka Dharma Saba harus menerapkan prinsip akuntabilitas dimana diwajibkan membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban agar tercipta keterbukaan antar anggota sehingga memperoleh kepercayaan dari anggota dan masyarakat.

Sebuah organisasi yang baik akan selalu mengutamakan aspirasi masyarakat maupun anggota secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dibangun melalui kebebasan berbicara serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan *sekaa Santhi* maka semua masyarakat dan anggota harus aktif dalam kegiatan *sekaa santhi*. Misalnya dalam membuat Rancangan Anggaran Biaya untuk kegiatan GENITRI atau Piodalan di Pura Dalem. Anggota *sekaa santhi* harus terlibat dalam hal penentuan transaksi-transaksi yang terjadi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik.

Dalam sebuah organisasi baik *profit* atau *non-profit* dibutuhkan keadilan. Keadilan merupakan suatu kepentingan untuk melindungi masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Keadilan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap organisasinya (Astriandy, 2018). Dengan adanya keadilan akan dapat mempertahankan citra organisasi dalam jangka yang panjang. Dalam organisasi *sekaa santhi* terdapat *awig-awig* mengenai *Pawongan* desa adat. *Awig-awig* tersebut berhubungan dengan keadilan antar krama banjar. Misalnya dalam pengelolaan keuangan, selain dibuat oleh bendahara dan pengurus sebaiknya semua anggota mengetahui hasil laporan keuangan sehingga dapat memperoleh rasa keadilan dan kepercayaan.

Dengan adanya laporan keuangan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan suatu organisasi dapat diwujudkan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi suatu kegiatan organisasi. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yaitu, manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, kreditor, investor, pemerintah dan lembaga lainnya. Laporan keuangan dikatakan baik apabila terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan



(PSAK). Menurut PSAK No. 45 laporan keuangan nonlaba terdiri dari empat unsur yaitu, laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk satu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan.

*Sekaa Santhi* di Banjar Penarungan yang mendapatkan pendapatan dari *Batu-batu Uleman* harus dikelola dengan baik sehingga dalam pelaksanaan praktik pengelolaan keuangan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan *sekaa santhi* di banjar Penarungan merupakan suatu hal menarik yang bisa dikaji lebih mendalam karena dalam pengelolaan keuangan *seka santhi* dikelola langsung oleh pengurus *sekaa santhi* tersebut. Dengan mengelola keuangan secara mandiri maka sesuai dengan peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Penerapan prinsip *good governance* menerapkan beberapa komponen seperti akuntabilitas yang merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan desa wisata kota Pekanbaru (Ningrum, 2016). Akuntabilitas juga merupakan prinsip yang penting untuk sebuah pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya.

Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan, oleh karena itu pengurus *sekaa santhi* di banjar Penarungan harus memiliki prinsip-prinsip mengenai akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan. Hal itu berkaitan dengan amanah yang diberikan pengurus oleh anggotanya untuk mengelola keuangan dengan baik. Hal ini harus dipatuhi oleh pengurus dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran seperti halnya pemasukan *batu-batu uleman* serta pengeluaran-pengeluaran dengan angka yang tidak pasti. Sehingga dari beberapa jenis pemasukan dan pengeluaran, pengurus harus bersikap adil kepada anggota dan masyarakat desa saat *paruman* agar tidak ada rekayasa-rekayasa.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Januarta Resia Jaya pada tahun 2019. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti prinsip akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan prinsip partisipasi masyarakat dan keadilan dalam pengelolaan keuangan *sekaa santhi*. Perbedaan kedua yaitu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, dengan objek penelitian *sekaa santhi* yang merupakan organisasi nirlaba dengan perolehan pendapatan untuk dikelola melalui *batu-batu uleman*. Sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek di pura Beji desa Sangsit. Penelitian ini menggunakan objek *sekaa santhi* karena *sekaa santhi* akan selamanya digunakan dalam tradisi upacara-upacara agama di Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Menelaah Pengelolaan Keuangan Sekaa Santhi Eka Dharma Saba atas Pendapatan Batu-batu Uleman di Banjar Penarungan.**”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengurus *sekaa santhi* banjar Penarungan tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga kurangnya keterbukaan dengan anggota.
2. Pengurus *sekaa santhi* banjar Penarungan tidak membuat Rancangan Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan sehingga sering kali terjadi pengeluaran dengan angka yang tidak pasti.
3. Pencatatan laporan keuangan *sekaa santhi* banjar Penarungan masih sangat sederhana sehingga perlu diperbaiki pencatatannya agar jelas pemasukan dan pengeluarannya.
4. Tidak adanya ketetapan tarif upah *Batu-batu Uleman* yang diberikan oleh *kelian* dadia kepada *sekaa santhi*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada *Sekaa Santhi* Eka Dharma Saba di banjar Penarungan, maka peneliti membatasi permasalahan pada pengelolaan keuangan dengan melalui pendapatan *batu-batu uleman* terhadap pengurus *sekaa santhi*.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilannya dalam pengelolaan keuangan *seka santhi* sebagai organisasi nirlaba yang berada di bawah aturan banjar?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini

yaitu :

1. Untuk mengetahui mengenai akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan dalam pengelolaan keuangan *Sekaa Santhi* Eka Dharma Saba yang berada di bawah aturan banjar.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai organisasi nirlaba seperti *Sekaa Santhi*, terkhususnya mengenai upah *batu-batu uleman* sebagai sumber pendapatan *sekaa santhi*. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan *Sekaa Santhi* Eka Dharma Saba, khususnya mengenai pengelolaan keuangan melalui pendapatan *batu-batu uleman* menjadi lebih terbuka dan adil. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi

pengurus *Sekaa Santhi Eka Dharma Saba* akan pentingnya pembuatan laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan rancangan anggaran biaya untuk mengurangi adanya kecurangan maupun ketidakadilan.

